



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN **2025**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah swt, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada program dan kegiatan Dinas PMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program / Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Disamping itu Renja berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara transparan, cepat dan mudah sebagai perwujudan e-Governance secara umum serta memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bagi masyarakat dan pelaku usaha pada khususnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini.



Pangkajene Sidenreng, 02 Agustus 2024
Kepala Dinas,

Drs. H. LABENGNGA, M.Si

NIP. 19641231 199003 1 126

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2023	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	44
4.1 Program dan Kegiatan.....	44
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 s/d Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	9
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.....	20
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	27
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	40
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana Program/Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran mengacu pada pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Rencana Kerja Tahun 2025 juga menjabarkan tujuan dan sasaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Renja 2025 ini disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP 2024-2026. Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

I.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih Pemungutan Liar
 14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018;
 18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;
 20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Tahun Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023);
 21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025;

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dimaksud;

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025 yang akan dibiayai dengan APBD dan sumber-sumber biaya lainnya.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2025 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah ;

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TAHUN 2024**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 didasarkan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023, untuk mengetahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								-	
2	18	01			Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Cakupan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100		100	100	100	100	100
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Dokumen	13		4		-	-	-
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2		1	1	100		
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	2	1	1	100		

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		1	-	-		
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	2	1	1	100		
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		1	-	-		
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	2	1	1	100		
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Darah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan	8	3	2		-	3	38

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	108	36	19	19	100		
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1	1	1	100		
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	2	1	-	-		
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tahun	1	-	100		-	-	-
2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	-	2	-	-		
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi	Persen	100	-	20	-	-	-	-

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kepegawaian Tepat Waktu								
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25	-	1		-		
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	-		-	#DIV/0!		
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	-		-	#DIV/0!		
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	Bulan	36	12	12		-	12	33
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	105	51	14	14	100		
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	Paket	49	18	26	-	-		

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36	21	12	12	100		
2	18	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	11	3	4	-	-		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	139	68	22	18	82		
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100		-	100	100
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	-	1	-			
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	-	-		-			
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	18	14	4	-			
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-		-			

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	1	5	-			
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	36	12	12		-	12	33
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	687	447	230	511	222		
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	24	12	12	100		
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	9	-	4	3	75		
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	0	12	12	100		
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persen	100	100	100		-	100	100

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	39	9	13	7	54		
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	6	1	1	100		
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	-	-		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengembngan Iklim Penanaman Modal	Persen	100	100	100	-	-	100	100
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	Dokumen	2	1	1		-	1	50
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	3	1	1	-	-		

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	2	-	2	-	-		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Investasi Penanaman Modal	Dokumen	12	8	4		-	8	67
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	12	8	4	4	100		
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	150	100	-	-	150	150
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi yang Dilaksanakan	Persen	100	150	100		-	150	150
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2	1	-	-		
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	4	-	2	-	-		

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persen	92	80	92	-	-	80	87
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang diterbitkan	Izin	16.000	5.591	5.000		-	5.591	35
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	16.000	5.591	5.000	5.315	106		
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen PerizinanBerusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	630	196	230	336	146		

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Tatakelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Orang	70	243	20	18	90		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	Persen	90	90	90	94	104	184	204
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang Ditinjau Penggunaan Perizinannya	Investor	150	170	55	98	178	268	179
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	522	70	240	-	-		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	806	240	260	180	69		

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)	KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	700	102	110	98	89		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	Persen	100	100	100	-	-	100	100
2	18	06	2.01	-	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan	Laporan	12	8	4		-	8	67
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Laporan	12	8	4	4	100		

BERDASARKAN RPD 2024-2026

KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)			KINERJA RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	TARGET	REALISASI		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100	100	1	100	300	3
2.18.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	100 %	100	100	100	1	100	300	3
2.18.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokum en	2	1	1	1	-	3	1
2.18.01.2. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokum en	-	1	1	1	1	2	2
2.18.01.2. 01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokum en	2	1	1	1	1	4	4
2.18.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Lapora n	2	1	1	1	1	4	4



KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)			KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	TARGET	REALISASI		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1	2	100	50	100	201	2
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	36	19	19	1	19	74	4
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1	1	1	1	3	3
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	12	12	12	1	12	36	3
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	37 Paket	51	14	14	1	37	102	3
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	18	-	-	0	26	0	0
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21	12	12	1	12	45	4



KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)			KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	TARGET	REALISASI		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lapora n	3	4	-	0	5	0	0
2.18.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lapora n	68	22	18	1	25	111	11
2.18.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12	12	12	1	12	36	3
2.18.01.2. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130 Lapora n	447	230	219	1	130	796	6
2.18.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	24	12	12	1	12	48	4
2.18.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Lapora n	-	4	3	1	5	8	2
2.18.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	-	12	12	1	12	24	2
2.18.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100	100	77	1	100	277	3



KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)			KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	TARGET	REALISASI		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	9	13	7	1	13	29	2
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	100 %	-	100	-	-	100	100	1
2.18.02.2. 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan	1 Dokum en	1	1	-	-	2	3	3
2.18.02.2. 01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokum en	1	-	-	0!	1	2	2
2.18.02.2. 01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokum en	-	-	-	0	1	1	1



KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)			KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	TARGET	REALISASI		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.02.2. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	12 Dokum en	8	4	4	1	12	24	2
2.18.02.2. 02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12 Dokum en	8	12	12	1	12	32	3
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100 %		100	-	-	100	100	1
2.18.03.2. 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	2 Kegiat an		100	-	-	2	2	1
2.18.03.2. 01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokum en	2	-	0	0	1	0	0
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	90 %	1	92	80	1	80	161	2
2.18.04.2. 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	5300 Izin	5.591	5.000	5.315	1	5.100	16.006	3



KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)			KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	TARGET	REALISASI		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
2.18.04.2. 01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5300 Pelaku Usaha	5.591	5.000	5.315	1	5.100	16.006	3
2.18.04.2. 01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15 Pelaku Usaha	-	-	20	0	18	38	3
2.18.04.2. 01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	270 Kegiat an Usaha	-	-	-	0	250	250	1



KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)			KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	TARGET	REALISASI		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taati Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	95		90	90	94	1	95	279	3
2.18.05.2. 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taati Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	255	Pelaku Usaha	170	55	98	2	250	518	2
2.18.05.2. 01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	255	Pelaku Usaha	-	-	150	0	250	400	2
2.18.05.2. 01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35	Kegiat an Usaha	-	-	-	0	30	30	1



KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)			KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	TARGET	REALISASI		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	100 %	100	100	100	1	100	300	3
2.18.06.2. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	4 Dokum en	8	4	4	1	4	16	4
2.18.06.2. 01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokum en	8	4	4	1	4	16	4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi yang menangani masalah Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (PMDN/PMA) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Indikator kinerja utama menjadi ukuran instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

a. Nilai Investasi PMDN dan PMA

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	323.553.964.518	490.256.390.480	4.080.460.321.147

b. Jumlah Investor PMDN dan PMA

Jumlah Investor Penanaman Modal terdiri atas PMDN dan PMA. Jumlah PMDN terbagi atas Skala Mikro, Skala Kecil, Skala Menengah dan Besar. Jumlah Investor dari tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah Investor PMDN dan PMA Tahun Berjalan	989	919	4655

c. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pada Unit Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 sebesar 87,13 berada pada kategori baik (pada interval 76,61-88,30%).

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

o	Indikator		SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)												
1	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%			0,064	0,49	0,63	0,63	350,67		0,63	0,63	
2	Nilai investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah			157.227.306.000	158.000.000.000	159.000.000.000	160.000.000.000	4.080.460.321.147		159.000.000.000	160.000.000.000	
3	Jumlah investor PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Investor			280	280	300	320	4655		300	320	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin			90	87,21	87,25	88	87,13		87,25	88	
5	Predikat Nilai SAKIP	Poin			70	70	71	72	69,96		71	72	
	IKK								100				
1	Cakupan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%			100	100	100	100	100		100	100	
2	Cakupan promosi penanaman modal	%			100	100	100	100			100	100	
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%			92	95	95	95	90		95	95	
4	Prosentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%			90	80	85	90	70		85	90	
5	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dapat diakses	%			100	100	100	100	100		100	100	
6	Cakupam Penunjang Urusan Pemerintahan	%			100	100	100	100	95		100	100	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang serta untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga penanaman modal dan penyelenggara pelayanan perizinan dengan tugas dan fungsi adalah :

- a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Renja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. Dalam penyusunan Renja ini perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis SWOT. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*Strengths and Weaknesses*) dan kondisi eksternal (*Oppurtunities and Threats*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

1.1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;

- b. Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/pemohon izin.

1.2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan perizinan belum optimal dan belum memadai;
- b. Koordinasi dengan investor belum optimal;
- c. Belum tersedianya instrumen pendukung penanganan penanaman modal dan perizinan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

1.1 Kesempatan (Opportunities)

- a. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali
- b. Adanya kebijakan pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan/usaha masyarakat
- c. Dukungan dari visi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis modern

1.2 Ancaman (Threats)

- a. Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
- b. Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;
- c. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan
- d. Persaingan investasi dengan Kabupaten lain semakin ketat

Dengan mempergunakan analisis SWOT, maka strategi yang dapat dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan dengan melakukan kebijakan sebagai berikut :

1) Peningkatan promosi

Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.

2) Penyempurnaan regulasi

Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3) Peningkatan pemanfaatan teknologi berbasis IT

Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut.

4) Peningkatan SDM pelayanan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal;

5) Peningkatan sarana prasarana

Mengoptimalkan anggaran dan aparatur yang ada untuk menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.

6) Peningkatan kapasitas kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan

fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

- a. Adanya motivasi yang tinggi dari staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- b. Adanya stabilitas keamanan yang kondusif untuk meningkatkan minat investor dan pengusaha.
- c. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait.
- d. Adanya dukungan dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan investasi.

4. Isu – isu Strategis

Terdapat isu-isu penting yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Citra pelayanan yang dianggap masih berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan;
- b. Masih minimnya sosialisasi dan informasi pelayanan perizinan;
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan;
- e. Anggapan bahwa pengurusan izin hanya untuk masyarakat yang ada di perkotaan;

- f. Masyarakat yang tersebar jauh dari pusat pelayanan perizinan.

Dalam Pelayanan Perizinan, ada dua paradigma utama yang perlu dilakukan, yaitu :

- a. Reformasi regulasi perizinan, saat ini perizinan usaha sangat banyak dan tumpang tindih.
- b. Reformasi birokrasi perizinan, saat ini persyaratan pengurusan perizinan sangat banyak, tumpang tindih dan menyangkut banyak instansi teknis sehingga prosedur pelayanan tidak efisien.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan perizinan dalam bentuk :

- a. Pemangkasan tahapan dan prosedur, baik lintas instansi maupun dalam instansi.
- b. Pemangkasan biaya, hal ini dapat dilakukan apabila prosedur juga dipangkas.
- c. Pengurangan jumlah persyaratan, jumlah persyaratan dapat dikurangi dan satu jenis persyaratan sudah dapat digunakan untuk berbagai izin yang diperlukan.
- d. Pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan
- e. Pengurangan waktu pemrosesan, dengan sistem dan prosedur yang disederhanakan sehingga pemangkasan waktu pemrosesan mendapat pertimbangan utama.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : **“Terwujudnya Layanan Perizinan yang Berkualitas serta Iklim Ivestasi yang Kondusif untuk Mendorong Ekonomi Menuju Daerah Unggul, Mandiri dan Berdaya Saing “**.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Layanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan
2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Investasi

Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi pelayanan perizinan secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan belum sempurna dan belum mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga perlu diperlukan perbaikan-perbaikan dan penambahan. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan, maka ada beberapa perbaikan anggaran pada beberapa kegiatan dan penambahan kegiatan yang baru.

Untuk lebih jelas, kami sajikan review rancangan awal sebelum dan setelah dilakukan perbaikan dalam table berikut :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.945.859.137	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.945.859.137
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	100 %	2.020.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	100 %	2.020.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku men	1.010.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku men	1.010.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Doku men	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Doku men	-



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapo ran	1.010.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapo ran	1.010.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Cakupan Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.732.502.697	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		KAB. SIDENRENG RAPPANG	Cakupan Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.732.502.697
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Oran g/bula n	1.731.099.807	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Oran g/bula n	1.731.099.807
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapo ran	1.402.890	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapo ran	1.402.890
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	22.187.470	Administrasi Umum Perangkat Daerah		KAB. SIDENRENG RAPPANG	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bula n	22.187.470



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	37 Paket	707.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	37 Paket	707.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	1.360.470	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	1.360.470
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Lapor an	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Lapo ran	-
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lapor an	20.120.000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lapo ran	20.120.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	140.973.990	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bula n	140.973.990
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130 Lapor an	1.336.230	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130 Lapo ran	1.336.230



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.689.979	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.689.979
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.293.111	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.293.111
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.654.670	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.654.670
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	48.174.980	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	48.174.980
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	48.174.980	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	48.174.980



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	100 %	5.050.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	100 %	5.050.000
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Perda yang Diterbitkan	1 Dokumen	3.030.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Perda yang Diterbitkan	1 Dokumen	3.030.000
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1.515.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1.515.000
	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	1.515.000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	1.515.000



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Berusaha Berbasis Resiko					Berbasis Resiko				
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	12 Doku men	2.020.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	12 Doku men	2.020.000
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12 Doku men	2.020.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12 Doku men	2.020.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100 %	15.150.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100 %	15.150.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	2 Kegiat an	15.150.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	2 Kegiat an	15.150.000
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Doku men	15.150.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Doku men	15.150.000





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota				
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	85 %	166.650.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	85 %	166.650.000
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	5200 Izin	166.650.000	0 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	5200 Izin	166.650.000
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5200 Pelaku Usaha	161.600.000	0 0 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5200 Pelaku Usaha	161.600.000



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15 Pelak u Usaha	2.020.000	0 0 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15 Pelak u Usah a	2.020.000
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	260 Kegiat an Usaha	3.030.000	0 0 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	260 Kegiat tan Usah a	3.030.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	95 %	421.574.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	95 %	421.574.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	255 Pelak u Usaha	421.574.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	255 Pelak u Usah a	421.574.000



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota				
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	255 Pelak u Usaha	321.750.650	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	255 Pelak u Usah a	321.750.650
	Pengawasan Penanaman Modal	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35 Kegiat an Usaha	99.823.350	Pengawasan Penanaman Modal	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35 Kegiat an Usah a	99.823.350
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	100 %	3.030.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	100 %	3.030.000





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INFORMASI PENANAMAN MODAL					INFORMASI PENANAMAN MODAL				
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	4 Doku men	3.030.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	4 Doku men	3.030.000
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Doku men	3.030.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Doku men	3.030.000
				TOTAL	2.557.313.137				TOTAL	2.557.313.137

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan peningkatan kualitas aparturnya melalui:

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
2. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah;
4. Peningkatan kualitas pembinaan di masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam hal pembangunan dan mendorong minat masyarakat untuk peningkatan taraf perekonomiannya;

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Usulan Program dan kegiatan Masyarakat, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memiliki usulan dari Masyarakat/Pemangku Kepentingan melalui pelaksanaan Musrenbang maupun Reses DPRD.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel T-C.32.

TABEL T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah. Pada bab ini tertuang hasil telaah kebijakan dan program pembangunan nasional yang melekat pada perangkat daerah. Kebijakan dan prioritas pembangunan dan program prioritas dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebanyak 5 prioritas pembangunan yaitu;

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air.
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.



Sedangkan Pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang disertai dengan perbaikan tata kelola pemerintahan pada semua unsur pembangunan, mewujudkan pengawasan internal pemerintahan yang semakin berkualitas, dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di semua unit pelayanan yang berbasis pada teknologi informasi. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan meningkatkan kinerja *e-government*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025 sesuai Renstra perangkat daerah adalah :

3.2.1 Tujuan :

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui kegiatan tahunan. Rencana strategis memuat target indikator kinerja tingkat sasaran strategis untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja sasaran. Tujuan Renja 2025 sebagaimana tercantum dalam Renstra 2024-2026 adalah Mendorong Peningkatan Nilai Investasi Daerah.



3.2.2 Sasaran :

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
- b. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja (Renja) dan Pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan usulan program/ kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman
 - 2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 3.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 4.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 
- 5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 5.1 Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 6.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	100 %	1.945.859.137			100 %	1.965.317.728
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	100 %	2.020.000			100 %	2.040.200
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	1 Dokumen	1.010.000			1 Dokumen	1.020.100
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	0 Dokumen	-			- Dokumen	-

2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	1	Laporan	1.010.000		1	Laporan	1.020.100
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	100	%	1.732.502.697		100	%	1.749.827.743
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. SIDENRENG RAPPANG	19	Orang/bulan	1.731.099.807		19	Orang/bulan	1.748.410.824
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	1	Laporan	1.402.890		1	Laporan	1.416.919
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	KAB. SIDENRENG RAPPANG	12	Bulan	22.187.470		12	Bulan	22.329.326
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	37	Paket	707.000		37	Paket	714.070
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	26	Paket	1.360.470		26	Paket	1.374.075

		Kantor yang Disediakan								
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	0	Paket	-		0	Paket	-
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. SIDENRENG RAPPANG	0	Laporan	-		-	Laporan	-
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. SIDENRENG RAPPANG	10	Laporan	20.120.000		10	Laporan	20.241.181
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	12	Bulan	140.973.990		12	Bulan	142.463.729
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. SIDENRENG RAPPANG	130	Laporan	1.336.230		130	Laporan	1.349.592
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	12	Laporan	48.689.979		12	Laporan	49.176.879
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	5	Laporan	1.293.111		5	Laporan	1.386.042

2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	12	Laporan	89.654.670		12	Laporan	90.551.216
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	KAB. SIDENRENG RAPPANG	100	%	48.174.980		100	%	48.656.730
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KAB. SIDENRENG RAPPANG	13	Unit	48.174.980		13	Unit	48.656.730
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	KAB. SIDENRENG RAPPANG	100	%	5.050.000		100	%	5.100.500
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	1	Dokumen	3.030.000		1	Dokumen	3.060.300
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	KAB. SIDENRENG RAPPANG	1	Dokumen	1.515.000		1	Dokumen	1.530.150

2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	KAB. SIDENRENG RAPPANG	1	Dokumen	1.515.000		1	Dokumen	1.530.150
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	12	Dokumen	2.020.000		12	Dokumen	2.040.200
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	12	Dokumen	2.020.000		12	Dokumen	2.040.200
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	100	%	15.150.000		100	%	15.301.500
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	2	Kegiatan	15.150.000		2	Kegiatan	15.301.500
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	KAB. SIDENRENG RAPPANG	1	Dokumen	15.150.000		1	Dokumen	15.301.500
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	KAB. SIDENRENG RAPPANG	85	%	166.650.000		90	%	168.316.500

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	KAB. SIDENRENG RAPPANG	##	Izin	166.650.000			5300	Izin	168.316.500
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	KAB. SIDENRENG RAPPANG	##	Pelaku Usaha	161.600.000			5300	Pelaku Usaha	163.216.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	KAB. SIDENRENG RAPPANG	15	Pelaku Usaha	2.020.000			15	Pelaku Usaha	2.040.200

2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	KAB. SIDENRENG RAPPANG	260	Kegiatan Usaha	3.030.000			270	Kegiatan Usaha	3.060.300
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	KAB. SIDENRENG RAPPANG	95	%	421.574.000			95	%	425.789.740
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	KAB. SIDENRENG RAPPANG	255	Pelaku Usaha	421.574.000			255	Pelaku Usaha	425.789.740
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	KAB. SIDENRENG RAPPANG	255	Pelaku Usaha	321.750.650			255	Pelaku Usaha	324.968.157

2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	KAB. SIDENRENG RAPPANG	35	Kegiatan Usaha	99.823.350		35	Kegiatan Usaha	100.821.584
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	KAB. SIDENRENG RAPPANG	100	%	3.030.000		100	%	3.060.300
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	4	Dokumen	3.030.000		4	Dokumen	3.060.300
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	4	Dokumen	3.030.000		4	Dokumen	3.060.300
JUMLAH						2.557.313.137				2.582.886.268

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Masih terdapat beberapa kekurangan yang akan menjadi bahan di tahun berikutnya, sehingga akan menjadi perhatian untuk dapat disempurnakan mengingat Renja ini akan menjadi pedoman penyusunan RKA dan DPA tahun 2025.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sehingga visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terwujud.



Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.